



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN
Jl. Pramuka No. 33, BPKP Pusat Lantai 4, Jakarta 13120, Telp/Fax: 021-85910107

LAPORAN KINERJA BPKP TRIWULAN II TAHUN 2018

NOMOR : LKIN - 40/SU01/2/2018
TANGGAL : 23 Agustus 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN**

Gedung BPKP Pusat Lantai 4, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon 021-85910031 Ext. 0415/, Faksimile 021-85910107

Nomor : LKIN-40/SU01/2/ 2018 23 Agustus 2018
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Triwulan II
Tahun 2018

**Yth. Sekretaris Utama
di**

Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Kinerja BPKP Triwulan II Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja BPKP sampai dengan triwulan II tahun 2018 diperlihatkan sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja BPKP Triwulan II Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi s.d. Tw II 2018	Capaian s.d. Tw II 2018
I	<i>Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional</i>			
1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 2	Belum diukur	Belum diukur
II	<i>Sasaran Strategis 2. Meningkatnya maturitas SPIP</i>			
2	Maturitas SPIP K/L (Level 3)	55%	26,74%	48,62%
3	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	60%	50,00%	83,33%
4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)	45%	31,50%	70,00%
5	Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)	50%	Belum diukur	Belum diukur
III	<i>Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda</i>			
6	Kapabilitas APIP K/L (Level 3)	56%	27,91%	49,84%
7	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	74%	50,00%	67,57%
8	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3)	51%	24,02%	47,10%

Kinerja BPKP sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N), dengan uraian kinerja sebagai berikut:

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)



Indeks AP3N diperoleh dari rata-rata hasil pengukuran indeks AP3N berbagai prioritas pembangunan nasional. Indeks ini diukur menggunakan 5 variabel, 5 dimensi, dan 89 indikator.

Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018, pemerintah menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 32 program prioritas dan 160 kegiatan prioritas sebagaimana dalam tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas		Jumlah Keg. Prioritas
1	Pendidikan	1	Pendidikan Vokasi	5
		2	Peningkatan Kualitas Guru	4
2	Kesehatan	3	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	3
		4	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,	3
		5	Penguatan Promotif dan Preventif "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat".	3
3	Perumahan dan Permukiman	6	Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak	4
		7	Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi	2
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	8	Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata	4
		9	Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	5
		10	Pengembangan 3 Kawasan Industri	4
		11	Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja	9
		12	Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa	4
5	Ketahanan Energi	13	Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi	7
		14	Pemenuhan Kebutuhan Energi	6
6	Ketahanan Pangan	15	Peningkatan Produksi Pangan	7
		16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	8
7	Penanggulangan Kemiskinan	17	Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	5
		18	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	3
		19	Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	5
8	Infrastruktur, konektivitas dan Kemaritiman	20	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara, dan Intermoda)	3
		21	Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika	5
9	Pembangunan Wilayah	22	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	6
		23	Pembangunan Perdesaan	7
		24	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	5
		25	Reforma Agraria	5
		26	Percepatan Pembangunan Wilayah Papua	7
10	Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan	27	Penguatan Pertahanan	4
		28	Stabilitas Politik dan Keamanan	12
		29	Kepastian Hukum	3
		30	Reformasi Birokrasi	4

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program Prioritas		Jumlah Keg. Prioritas
11	Asian Games dan Asian Para Games 2018	31	Sukses Penyelenggaraan	5
		32	Sukses Prestasi	3
JUMLAH				160

Sumber: RKP Tahun 2018

Atas 11 prioritas pembangunan nasional dan 32 program prioritas tersebut, BPKP akan melakukan pengukuran indeks P3N antara lain pada 9 program prioritas, yaitu :

- 1) Program Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja pada Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata.
- 2) Program Peningkatan Produksi Pangan pada Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
- 3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Prioritas Nasional Ketahanan Pangan.
- 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi pada Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman (Darat, Laut, Udara, Intermoda).
- 5) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Prioritas Nasional Kesehatan
- 6) Program Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran pada Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan
- 7) Program Pendidikan Vokasi pada Prioritas Nasional Pendidikan
- 8) Program Peningkatan Kualitas Guru pada Prioritas Nasional Pendidikan
- 9) Program Pembangunan Perdesaan pada Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan indeks AP3N berada pada level 2.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, indeks AP3N belum dilakukan pengukuran. Indeks AP3N akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV setelah dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program prioritas, kegiatan prioritas, serta proyek prioritas yang berada di bawah masing-masing prioritas pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indeks AP3N skala 2 pada tahun 2018, upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP sampai dengan triwulan II tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengawasan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian, Kemaritiman, Polhukam dan PMK

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, BPKP telah melakukan monev dan reviu tata kelola proyek-proyek strategis nasional bidang perekonomian, kemaritiman, polhukam dan PMK, sebagai berikut:

Tabel 3. Reviu Tata Kelola PSN s.d. Triwulan II Tahun 2018 Bidang Perekonomian, Kemaritiman, Polhukam dan PMK

No	Monev/ Reviu Infrastruktur PSN	Jml PSN yang di reviu	Kedeputian yang terlibat
1	Pembangunan jalan tol	57	D1, D4
2	Pembangunan/ pengembangan bendungan	41	D1
3	Pembangunan/ pengembangan jalur kereta api	16	D1
4	Pembangunan/ pengembangan kawasan Industri	16	D1
5	Pembangunan/ pengembangan pelabuhan	14	D1, D4
6	Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK)	13	D3
7	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM)	7	D4
8	Pembangunan/ pengembangan bandara	6	D1, D4
9	Pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional	5	D1
10	Pembangunan waduk	5	D1

No	Monev/ Reviu Infrastruktur PSN	Jml PSN yang di reviu	Kedeputian yang terlibat
11	Pembangunan smelter	4	D1, D4
12	Program 1 juta rumah	3	D1
13	Palapa ring broadband	3	D2, D4
14	Pembangunan jalan non tol	3	D1
15	Pembangunan technopark	3	D2
16	Pembangunan irigasi	2	D1
17	Pembangunan LRT	2	D4
18	Pembangunan MRT	2	D1
19	Pengembangan pesawat N-245 dan R80	2	D1, D4
20	Pembangunan pos lintas batas negara (PLBN)	1	D1
21	<i>Nasional Capital Integrated Coastal Development (NCICD)</i>	1	D1
22	Pembangunan sistem air limbah komunal (<i>Jakarta Sewerage System</i>)	1	D1
	JUMLAH	207	

Sumber: SIMA

Ket:

D1= Kedeputian Perekonomian dan Kemaritiman

D2= Kedeputian Polhukam dan PMK

D3= Kedeputian Pengawasan Keuangan Daerah

D4= Kedeputian Akuntan Negara

Di samping itu, sampai dengan triwulan II tahun 2018 BPKP juga telah melakukan kegiatan pengawasan proyek strategis nasional pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebanyak 59 proyek, dan monitoring persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 pada 10 instansi/ lembaga, yaitu Kementerian BUMN, Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Inasgoc, Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sampai dengan triwulan II tahun 2018, BPKP melakukan pembinaan pengelolaan keuangan di daerah dengan mengimplementasikan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan, sebagai berikut:

Tabel 5. Bimtek/ Coaching Clinic SIMDA Tw II 2018

No	SIMDA	Jml Pemda
1	Perencanaan	73
2	Keuangan	25
3	BMD	5
4	Pendapatan	6
	Jumlah	109

Sumber: SIMA

Pada tahun 2018, sampai dengan triwulan II, BPKP juga melakukan evaluasi penyaluran/ penggunaan dana desa pada 144 kabupaten/ kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, implementasi SIMDA sebanyak 444 Pemda (81,92% dari jumlah pemda sebanyak 542), sedangkan implementasi Siskeudes sebanyak 68.374 desa (91,22% dari jumlah desa sebanyak 74.958).

3) Kegiatan Pengamanan Aset Negara/ Keinvestigasian

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, BPKP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengamanan aset negara/ keinvestigasian, yaitu audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli (PKA), evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, audit klaim, dan *fraud control plan*. Realisasi output sebanyak 1.008 laporan, atau mencapai 86,90% dari target tahun 2018 sebanyak 1.160 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Realisasi Output Kegiatan Keinvestigasian

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2018	Realisasi s.d. Tw II 2018	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4x100
1	<i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA) pada bidang Lintas Sektoral Pen- didikan Vokasi	Laporan	69	1	1,45
2	Penilaian Risiko Kecurangan Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	Laporan	69	-	-
3	Kajian pengawasan atas Akses Pembiayaan UMKM	Laporan	6	-	-
4	Mitigasi risiko atas pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada BNPB	Laporan	11	-	-
5	Audit Investigatif atas Pelaksanaan PSN	Laporan	52	-	-
6	Audit Investigatif	Laporan	66	8	12,12
7	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	Laporan	153	100	65,36
8	Pemberian Keterangan Ahli	Laporan	390	471	120,77
9	Komputer Forensik	Laporan	5	1	20,00
10	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	Laporan	29	1	3,45
11	Audit Penyesuaian Harga	Laporan	24	10	41,67
12	Audit Klaim	Laporan	17	2	11,76
13	Evaluasi atas Pelaksanaan Inpres 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	35	179	511,43
14	Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)	Laporan	71	32	45,07
15	<i>Fraud Control Plan</i>	Laporan	68	11	16,18
16	Kajian pengawasan	Laporan	1	1	100,00
17	Pengawasan atas pengamanan aset	Laporan	6	6	100,00
18	Peningkatan kompetensi auditor investigasi	Laporan	4	1	25,00
19	Kegiatan pengawasan lainnya	Laporan	84	184	219,05
Jumlah			1.160	1.008	86,90

Sumber: Kedeputian Investigasi

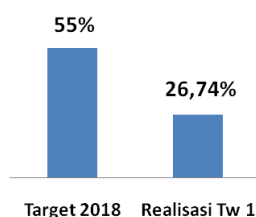
2 Sasaran Strategis Meningkatnya Maturitas SPIP

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Maturitas SPIP ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja, yaitu :

- 1) Maturitas SPIP K/L (level 3)
- 2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
- 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3)
- 4) Efektivitas SPI Korporasi

Uraian capaian empat indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

Maturitas SPIP K/L (Level 3)



Kinerja maturitas SPIP K/L (level 3) dihitung dari jumlah K/L dengan maturitas SPIP minimal level 3, dibagi jumlah K/L yang ada.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan maturitas SPIP K/L (level 3) sebesar 55%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, maturitas SPIP K/L minimal level 3 sebanyak 23 K/L, atau 26,74% dari jumlah K/L sebanyak 86. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 48,62%.

Dalam triwulan II tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 1 K/L yang mencapai maturitas SPIP minimal level 3, yaitu Badan SAR Nasional (BASARNAS).

Tabel 7. Perkembangan Jml K/L yang Mencapai Maturitas SPIP Level 3 menurut Kedepuitan Pembina

No	Kedepuitan Pembina	Jml K/L Mitra	Jumlah K/L SPIP Min. Lv 3			K/L Minimal Level 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	Perubahan	
1	Perekonomian	27	8	8	-	1) Kem. Keuangan, 2) Kem. Kelautan dan Perikanan, 3) BKPM, 4) Kem. ESDM, 5) Kem. Pariwisata, 6) Kem. Perdagangan, 7) BNP2TKI, 8) BPS
2	Polhukam	54	12	13	1	1) KPK, 2) BPKP, 3) Lemhanas, 4) Kemenlu, 5) Kem. Sekretaris Negara, 6) Kemendikbud, 7) Kemenristekdikti, 8) BPPT, 9) BAPETEN, 10) BATAN, 11) BPOM, 12) BIN, 13) BASARNAS
3	PKD	2	1	1	-	1) Kemendagri
4	AN	3	1	1	-	1) Kemen. BUMN
	Jumlah	86	22	23	1	

Sumber: Kedepuitan di Lingkungan BPKP

Tabel 8. Kondisi Maturitas SPIP K/L Tw II 2018

No	Kedepuitan Pembina	Jml K/L Mitra	Belum Dinilai	≤ Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	Perekonomian	27	-	5	14	8
2	Polhukam	54	3	4	34	13
3	PKD	2	-	-	1	1
4	AN	3	-	1	1	1
	Jumlah	86	3	10	50	23
	Persentase	100%	3,49%	11,63%	58,14%	26,74%

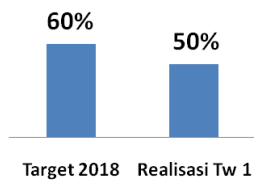
Sumber: Kedepuitan di Lingkungan BPKP

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) dihitung dari jumlah Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP minimal level 3, dibagi jumlah Pemerintah Provinsi yang ada.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) sebesar 60%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, Jumlah Pemerintah Provinsi dengan maturitas SPIP minimal level 3 sebanyak 17



Pemerintah Provinsi, atau 50,00% dari jumlah Pemerintah Provinsi sebanyak 34. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 83,33%.

Dalam triwulan II tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 1 Pemerintah Provinsi yang mencapai maturitas SPIP minimal level 3, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 9. Perkembangan Jml Pemerintah Provinsi yang Mencapai Maturitas SPIP Level 3

No	Populasi Pemerintah Provinsi	Jumlah Pemerintah Provinsi SPIP Min. Lv 3			Pemerintah Provinsi Minimal level 3
		Tw I 2018	Tw II 2018	Perubahan	
1	34	16	17	1	1) Sumatera Barat, 2) Kepulauan Riau, 3) Jawa Tengah, 4) Jawa Timur, 5) Daerah Istimewa Yogyakarta, 6) Bali, 7) Nusa Tenggara Barat, 8) Gorontalo, 9) Jawa Barat, 10) Lampung, 11) Kalimantan Barat, 12) Kalimantan Selatan, 13) Sulawesi Selatan, 14) Sulawesi Tengah, 15) Maluku Utara, 16) Sulawesi Tenggara, 17) Sulawesi Utara

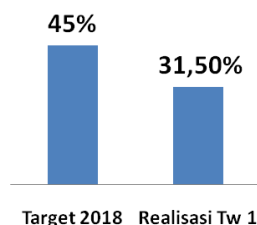
Sumber: Kedeputusan PKD

Tabel 10. Kondisi Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Tw II 2018

No	Jml Pemerintah Provinsi	Belum Dinilai	≤ Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	34	-	6	11	17
	Persentase	-	17,65%	32,35%	50,00%

Sumber: Kedeputusan PKD

Maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota (Level 3)



Maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota (level 3) dihitung dari jumlah Pemerintah Kab/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3, dibagi jumlah Pemerintah Kab/Kota yang ada.

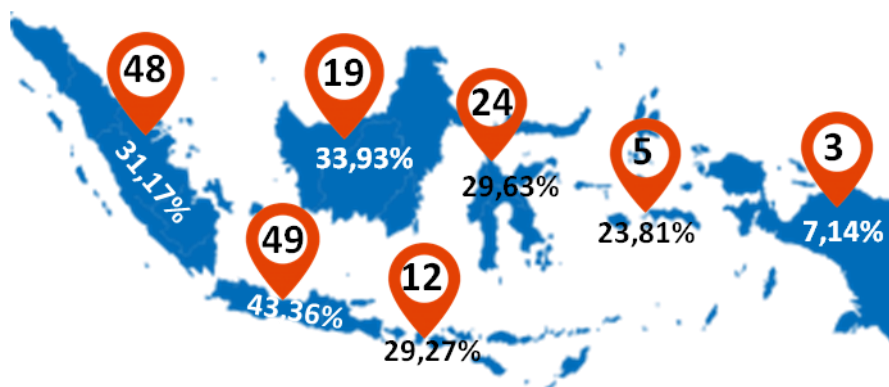
Pada tahun 2018, BPKP menargetkan maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota (level 3) sebesar 45%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, Jumlah Pemerintah Kab/Kota dengan maturitas SPIP minimal level 3 sebanyak 160 Pemerintah Kab/Kota, atau 31,50% dari jumlah Pemerintah Kab/Kota sebanyak 508. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 70,00%.

Dalam triwulan II tahun 2018, terdapat penambahan sebanyak 14 Pemerintah Kab/Kota yang mencapai maturitas SPIP minimal level 3, yaitu: 1) Gayo lues, 2) Bener Meriah, 3) Simeleu, 4) Aceh Tengah, 5) Tebing Tinggi, 6) phak phak barat, 7) Kab. Limapuluh Kota, 8) Bintan, 9) Batam, 10) Kab. Indramayu, 11) Kab Blitar, 12) Kota Malang, 13) Kab Mamuju, 14) Kota Bau Bau.

Berdasarkan hasil *quality assurance*/ validasi/ rekonsiliasi oleh Kedeputusan Rendal, sebanyak 6 Pemkab/ Pemkot perlu peningkatan dalam hal penilaian risiko, yaitu: 1) Kab. Kerinci, 2) Kota Sungai Penuh, 3) Kab. Timor Tengah Utara, 4) Kab. Sikka, 5) Kab. Sumba Timur, 6) Kab. Manggarai Barat

Gambar 1. Sebaran Kab/Kota Maturitas SPIP Level 3 Tw II 2018



Tabel 11. Perkembangan Jml Pemerintah Kab/Kota yang Mencapai Maturitas SPIP Minimal Level 3

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Kab/Kota SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	(+) / (-)	
Sumatera						
1	Aceh	23	5	9	4	1) Kab. Aceh Besar, 2) Kota Banda Aceh, 3) Kab. Aceh Barat, 4) Kab. Aceh Utara, 5) Kota Langsa, 6) Kab. Gayo lues, 7) Kab. Bener Meriah, 8) Kab. Simeleu, 9) Kab. Aceh Tengah
2	Sumut	33	3	5	2	1) Kota Binjai, 2) Kab. Humbang Hasundutan, 3) Kab. Labuhan Batu Utara, 4) Kota Tebing Tinggi, 5) Kab. Phak-phak Barat
3	Sumbar	19	10	11	1	1) Kab Tanah Datar, 2) Kota Padang, 3) Kota Payakumbuh, 4) Kota Bukit Tinggi, 5) Kab Pesisir Selatan, 6) Kab Dharmasraya, 7) Kab Padang Pariaman, 8) Kota Pariaman, 9) Kab. Agam, 10) Kota Solok, 11) Kab. Limapuluh Kota
4	Riau	12	4	4	-	1) Kab. Kep. Meranti, 2) Kab. Pelalawan, 3) Kab. Indragiri Hilir, 4) Kab. Kampar
5	Kepri	7	2	4	2	1) Kota Tanjung Pinang, 2) Kab Karimun, 3) Kab. Bintan, 4) Kota Batam
6	Jambi	11	2	-	(2)	-
7	Sumsel	17	5	5	-	1) Kab Lahat, 2) Kab Muara Enim, 3) Kab. Ogan Komerling Ilir, 4) Kab. Banyuasin, 5) Kab. Musi Banyuasin
8	Bengkulu	10	-	-	-	-
9	Babel	7	3	3	-	1) Kab. Bangka, 2) Kab. Bangka Tengah, 3) Kab. Bangka Barat
10	Lampung	15	7	7	-	1) Kab Pringsewu, 2) Kota Bandar Lampung, 3) Kota Metro, 4) Kab. Way Kanan, 5) Kab. Pesawaran, 6) Kab. Lampung Selatan, 7) Kab. Tanggamus
	Jumlah	154	41	48	7	
Jawa						
1	Banten	8	5	5	-	1) Kab Serang, 2) Kota Tangerang, 3) Kota Tangerang Selatan, 4) Kab. Lebak, 5) Kab. Tangerang
2	DKI Jakarta					

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Kab/Kot SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	(+) / (-)	
3	Jabar	27	6	7	1	1) Kab. Bogor, 2) Kab. Kuningan, 3) Kab. Sukabumi, 4) Kota Bekasi, 5) Kota Depok, 6) Kota Banjar, 7) Kab. Indramayu
4	Jateng	35	17	17	-	1) Kab Kudus, 2) Kota Surakarta, 3) Kab Boyolali, 4) Kab Karanganyar, 5) Kab. Magelang, 6) Kota Semarang, 7) Kab. Temanggung, 8) Kab. Pati, 9) Kab. Blora, 10) Kota Salatiga, 11) Kota Pekalongan, 12) Kab. Banyumas, 13) Kab. Pekalongan, 14) Kab. Sragen, 15) Kota Magelang, 16) Kab. Purworejo, 17) Kab. Cilacap
5	DIY	5	5	5	-	1) Kab Sleman, 2) Kab Kulonprogo, 3) Kota Yogyakarta, 4) Kab. Gunung Kidul, 5) Kab. Bantul
6	Jatim	38	13	15	2	1) Kab Bojonegoro, 2) Kab Ponorogo, 3) Kab Pacitan, 4) Kota Blitar, 5) Kota Mojokerto, 6) Kab Pasuruan, 7) Kota Surabaya, 8) Kab Tulungagung, 9) Kab Jombang, 10) Kab Lumajang, 11) Kab Bondowoso, 12) Kab Probolinggo, 13) Kab Banyuwangi, 14) Kab Blitar, 15) Kota Malang
	Jumlah	113	46	49	3	
Kalimantan						
1	Kalbar	14	4	4	-	1) Kota Pontianak, 2) Kab. Kubu Raya, 3) Kab. Sintang, 4) Kab. Landak
2	Kalteng	14	5	5	-	1) Kab. Kotawaringin Timur, 2) Kota Palangkaraya, 3) Kab. Kotawaringin Barat, 4) Kab. Lamandau, 5) Kab. Katingan
3	Kalsel	13	6	6	-	1) Kab Banjar, 2) Kota Banjarmasin, 3) Kab. Tabalong, 4) Kab. Hulu Sungai Utara, 5) Kota Banjarbaru, 6) Kab. Balangan
4	Kaltim	10	4	4	-	1) Kota Balikpapan, 2) Kota Bontang, 3) Kota Samarinda, 4) Kab. Kutai Kartanegara
5	Kaltara	5	-	-	-	-
	Jumlah	56	19	19	-	
Sulawesi						
1	Sulut	15	4	4	-	1) Kota Bitung, 2) Kota Manado, 3) Kota Kotamobagu, 4) Kab. Kepulauan Talaud
2	Gorontalo	6	3	3	-	1) Kota Gorontalo, 2) Kab. Gorontalo, 3) Kab. Pohuwato
3	Sulbar	6	2	3	1	1) Kab. Majene, 2) Kab. Polewali Mandar, 3) Kab Mamuju
4	Sulteng	13	1	1	-	1) Kab. Morowali
5	Sulsel	24	7	7	-	1) Kab Pinrang, 2) Kab. Luwu Utara, 3) Kota Makassar, 4) Kab. Wajo, 5) Kota Parepare, 6) Kab. Sidenreng Rappang, 7) Kota Palopo
6	Sultra	17	5	6	1	1) Kab. Konawe, 2) Kab. Kolaka, 3) Kota Kendari, 4) Kab. Wakatobi, 5) Kab. Kolaka Utara, 6) Kota Bau Bau
	Jumlah	81	22	24	2	

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Kab/Kot SPIP Minimal Lv 3			Kab/ Kota SPIP Minimal Lv 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	(+) / (-)	
Bali + Nusa Tenggara						
1	Bali	9	6	6	-	1) Kab Gianyar, 2) Kab Jembrana, 3) Kota Denpasar, 4) Kab Badung, 5) Kab. Buleleng, 6) Kab. Tabanan
2	NTB	10	5	5	-	1) Kab Lombok Barat, 2) Kab Lombok Tengah, 3) Kota Mataram, 4) Kab. Sumbawa Barat, 5) Kab. Sumbawa
3	NTT	22	5	1	(4)	1) Kab Timur Tengah Selatan
	Jumlah	41	16	12	(4)	
Maluku + Malut						
1	Maluku	11	3	3	-	1) Kab. Buru, 2) Kab. Maluku Tenggara, 3) Kab. Maluku Tengah
2	Maluku Utara	10	2	2	-	1) Kota Ternate, 2) Kota Tidore Kepulauan
	Jumlah	21	5	5	-	
Papua + Pabar						
1	Papua	29	-	-	-	-
2	Papua Barat	13	3	3	-	1) Kab. Sorong, 2) Kab. Teluk Bintuni, 3) Kab. Sorong Selatan
	Jumlah	42	3	3	-	
	Total	508	152	160	8	

Sumber: Kedeputan PKD

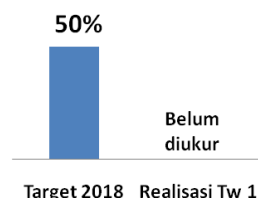
Tabel 12. Kondisi Maturitas SPIP Pemerintah Kab/Kota Tw II 2018

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 0	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	Aceh	23	-	-	14	9
2	Sumut	33	4	24	-	5
3	Sumbar	19	-	1	7	11
4	Riau	12	-	7	1	4
5	Kepri	7	-	1	2	4
6	Jambi	11	-	3	8	-
7	Sumsel	17	-	7	5	5
8	Bengkulu	10	-	7	3	-
9	Babel	7	-	1	3	3
10	Lampung	15	-	6	2	7
11	Banten	8	-	-	3	5
12	DKI Jakarta					
13	Jabar	27	-	19	1	7
14	Jateng	35	-	12	6	17
15	DIY	5	-	-	-	5
16	Jatim	38	-	-	23	15
17	Kalbar	14	-	-	10	4
18	Kalteng	14	-	-	9	5

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 0	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
19	Kalsel	13	-	-	7	6
20	Kaltim	10	1	4	1	4
21	Kaltara	5	-	4	1	-
22	Sulut	15	-	4	7	4
23	Gorontalo	6	-	-	3	3
24	Sulbar	6	-	1	2	3
25	Sulteng	13	1	9	2	1
26	Sulsel	24	-	3	14	7
27	Sultra	17	1	9	1	6
28	Bali	9	-	-	3	6
29	NTB	10	-	-	5	5
30	NTT	22	-	3	18	1
31	Maluku	11	5	3	-	3
32	Maluku Utara	10	-	5	3	2
33	Papua	29	7	18	4	-
34	Papua Barat	13	-	-	10	3
Jumlah		508	19	151	178	160
Persentase		100%	3,74%	29,72%	35,04%	31,50%

Sumber: Kedepatian PKD

Efektivitas SPI Korporasi



Efektivitas SPI korporasi dihitung dari jumlah korporasi dengan efektivitas SPI minimal level 3, dibagi jumlah korporasi yang dievaluasi.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan efektivitas SPI korporasi sebesar 50%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, efektivitas SPI korporasi belum ditargetkan, dan belum dilakukan pengukuran. Pengukuran efektivitas SPI korporasi akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2018 setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi sistem pengendalian intern korporasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP sampai dengan triwulan II tahun 2018 dalam upaya meningkatkan maturitas SPIP K/L/Pemda berupa bimtek/ *coaching clinic*/ *Quality Assurance* penilaian maturitas SPIP dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 13. Pembinaan Maturitas SPIP K/L/Pemda Tw II 2018

No	Bimtek/ <i>Coaching Clinic</i> / QA Penilaian Maturitas SPIP	Jml K/L/Pemda
1	Kementerian/ Lembaga	22
2	Pemerintah Provinsi	23
3	Pemerintah Kabupaten	274
4	Pemerintah Kota	54
	JUMLAH	373

Sumber: SIMA

Di samping itu, untuk mewujudkan komitmen yang kuat dari pimpinan K/L, BPKP Pusat mengadakan acara bincang pagi SPIP yang dihadiri Sesmenko/ Sesmen/ Sekjen/ Sestama 28 K/L. Bincang pagi juga dilakukan oleh Perwakilan BPKP, diantaranya Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Di lingkungan korporasi, sampai dengan triwulan II 2018, BPKP telah melakukan bimbingan teknis/ evaluasi penilaian sistem pengendalian intern (SPI) pada 21 korporasi baik BUMN maupun BUMD.

Di samping pembinaan efektivitas SPIP korporasi, sampai dengan triwulan II 2018, BPKP telah melakukan evaluasi kinerja PDAM pada 302 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, dan melakukan bimbingan teknis/ assessment penerapan GCG pada 41 korporasi, baik BUMN maupun BUMD.

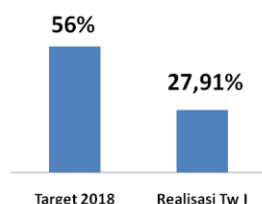
3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas APIP

Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas APIP ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja, yaitu :

- 1) Kapabilitas APIP K/L (level 3)
- 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)
- 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (level 3)

Uraian capaian tiga indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

Kapabilitas APIP K/L (Level 3)



Kinerja kapabilitas APIP K/L (level 3) dihitung dari jumlah APIP K/L dengan kapabilitas minimal level 3, dibagi jumlah APIP K/L yang ada.

Pada tahun 2018, BPKP menargetkan APIP K/L dengan kapabilitas (level 3) sebesar 56%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, jumlah APIP K/L dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 24 APIP, atau 27,91% dari jumlah APIP K/L sebanyak 85. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 49,84%.

Dalam triwulan II tahun 2018, terdapat penambahan 1 APIP K/L yang mencapai kapabilitas APIP minimal level 3, yaitu Kementerian Agama.

Tabel 14. Perkembangan Jml APIP K/L yang Mencapai Kapabilitas Level 3

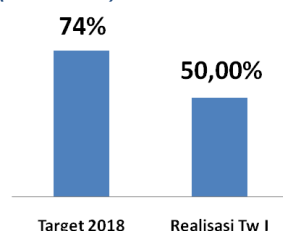
No	Kedeputian Pembina	Jml APIP Mitra	Jumlah APIP K/L Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP K/L Minimal Level 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	Perubahan	
1	Perekonomian	27	8	8	-	1) Kem. Keuangan, 2) Bappenas, 3) Kem. Kelautan dan Perikanan, 4) Kem. Lingkungan Hidup, 5) Kem. ESDM, 6) Kem. Pertanian, 7) Kem. Perhubungan, 8) BNP2TKI
2	Polhukam	55	14	15	1	1) BPKP, 2) Kemenkumham, 3) Kemendikbud, 4) Kemen-ristekdikti, 5) BPPT, 6) Badan tenaga nuklir nasional, 7) Bapeten, 8) BPOM, 9) TNI-AD, 10) Kemenag, 11) KPK, 12) Kemenlu, 13) Kemensesneg, 14) BPK, 15) POLRI
3	PKD	1	-	-	-	
4	AN	3	1	1	-	1) Kemen. BUMN
	Jumlah	86	23	24	1	

Sumber: Kedeputian di Lingkungan BPKP

Tabel 15. Kondisi Kapabilitas APIP K/L Tw II 2018

No	Kedeputian Pembina	Jml K/L Mitra	Belum Dinilai	< Lv 1	Lv 2	> Lv 3
1	Perekonomian	27	-	5	14	8
2	Polhukam	55	2	14	24	15
3	PKD	1	-	-	1	-
4	AN	3		1	1	1
	Jumlah	86	2	20	40	24
	Persentase	100%	2,32%	23,26%	46,51%	27,91%

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)



Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) dihitung dari jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas minimal level 3, dibagi jumlah APIP Pemerintah Provinsi yang ada. Pada tahun 2018, BPKP menargetkan APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas level 3 sebesar 74%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 17 APIP, atau 50,00% dari jumlah APIP Pemerintah Provinsi sebanyak 34. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 67,57%.

Tabel 16. Perkembangan Jml APIP Pemerintah Provinsi yang Mencapai Kapabilitas Level 3

No	Populasi APIP Pemerintah Provinsi	Jumlah APIP Pemerintah Provinsi Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Pemerintah Provinsi Minimal level 3
		Tw I 2018	Tw II 2018	Perubahan	
1	34	17	17	-	1) Sumatera Barat, 2) Kepulauan Riau, 3) DKI Jakarta, 4) Jawa Barat, 5) Jawa Tengah, 6) Kalimantan Tengah, 7) Kalimantan Selatan, 8) Kalimantan Utara, 9) Gorontalo, 10) Sulawesi Barat, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Maluku Utara, 13) Lampung, 14) DI Yogyakarta, 15) Kalimantan Barat, 16) Kalimantan Timur, 17) Nusa Tenggara Timur

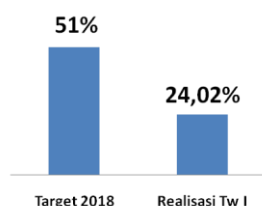
Sumber: Kedeputan PKD

Tabel 17. Kondisi Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Tw II 2018

No	Jml Pemerintah Provinsi	Belum Dinilai	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	34	-	1	16	17
	Persentase	-	2,94%	47,06%	50,00%

Sumber: Kedeputan PKD

Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (Level 3)



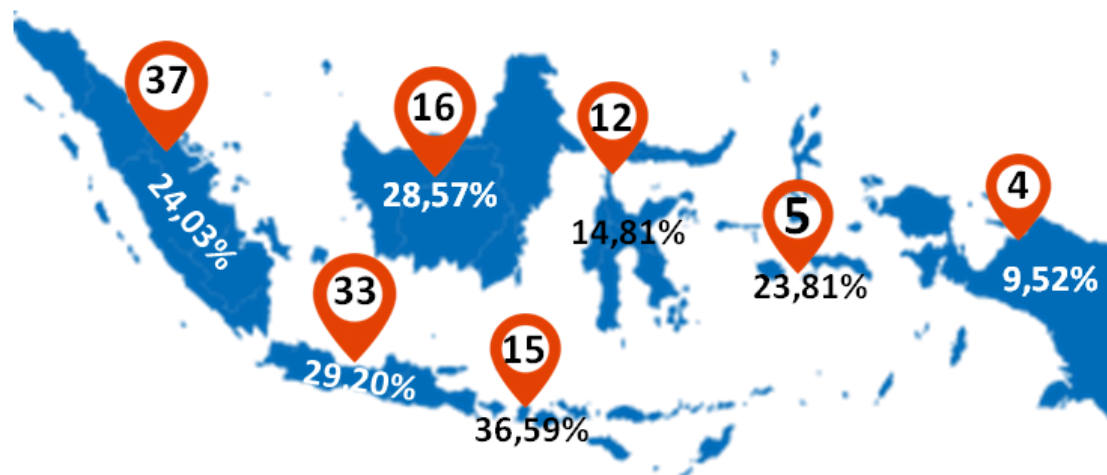
Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (level 3) dihitung dari jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota dengan kapabilitas minimal level 3, dibagi jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota yang ada. Pada tahun 2018, BPKP menargetkan APIP Pemerintah Kab/Kota dengan kapabilitas level 3 sebesar 51%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota dengan kapabilitas minimal level 3 sebanyak 122 APIP, atau 24,02% dari jumlah APIP Pemerintah Kab/Kota sebanyak 508. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 sebesar 47,10%.

Jumlah tersebut termasuk 36 APIP Pemerintah Kab/Kota yang telah melakukan *self assessment* level 3, namun masih memerlukan perbaikan kapabilitas dari sisi SDM, yaitu: 1) Kab. Gayo Lues, 2) Kota Binjai, 3) Kab Tebing Tinggi, 4) Kota Jambi, 5) Kab. Tebo, 6) Kab. Lahat, 7) Kab. Muara Enim, 8) Kab. Tanggamus, 9) Kota Bandar Lampung, 10) Kab. Pringsewu, 11) Kab. Way Kanan, 12) Kota Metro, 13) Kab Mesuji, 14) Kab. Pandeglang, 15) Kab. Kuningan, 16) Kab. Jepara, 17) Kab.

Banyumas, 18) Kab. Blora, 19) Kab. Banjar, 20) Kota Banjarmasin, 21) Kab. Tanah Bumbu, 22) Kab. Tanah Laut, 23) Kab. Barito Kuala, 24) Kab. Hulu Sungai Utara, 25) Kota Balikpapan, 26) Kab. Bontang, 27) Kab. Kep. Talaud, 28) Kab. Polewali Mandar, 29) Kota Makassar, 30) Kab. Bulukumba, 31) Kota Cilegon, 32) Kab. Lombok Tengah, 33) Kab. Ngada, 34) Kab. Manggarai Barat, 35) Kab. Paniai, 36) Kab. Fakfak

Gambar 2. Sebaran Kab/Kota dengan APIP Kapabilitas Level 3 Tw II 2018



Perkembangan jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai kapabilitas minimal level 3 per provinsi sebagaimana terdapat dalam tabel 18.

Tabel 18. Perkembangan Jml APIP Pemerintah Kab/Kota yang Mencapai Kapabilitas Level 3

No	Provinsi	Jml APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	(+) / (-)	
	Sumatera					
1	Aceh	23	4	4	-	1) Kota Banda Aceh, 2) Kota Langsa, 3) Kab. Aceh Barat, 4) Kab. Gayo Lues
2	Sumut	33	2	2	-	1) Kota Binjai, 2) Kab Tebing Tinggi
3	Sumbar	19	9	9	-	1) Kota Pariaman, 2) Kab. Agam, 3) Kab. Solok, 4) Kab. Tanah Datar, 5) Kab. Padang Pariaman, 6) Kota Padang, 7) Kab. Dharmasraya, 8) Kota Sawahlunto, 9) Kota Bukit Tinggi
4	Riau	12	3	3	-	1) Kab. Rokan Hulu, 2) Kab. Siak, 3) Kab. Indragiri Hilir
5	Kepri	7	2	2	-	1) Kota Tanjung Pinang, 2) Kab. Karimun
6	Jambi	11	2	2	-	1) Kota Jambi, 2) Kab. Tebo
7	Sumsel	17	6	6	-	1) Kab. Banyuasin, 2) Kab. Musi Rawas, 3) Kota Palembang, 4) Kab. Ogan Komering Ilir, 5) Kab. Lahat, 6) Kab. Muara Enim
8	Bengkulu	10	1	1	-	1) Kota Bengkulu
9	Babel	7	2	2	-	1) Kab. Bangka, 2) Kab. Bangka Tengah
10	Lampung	15	6	6	-	1) Kab. Tanggamus, 2) Kota Bandar Lampung, 3) Kab. Pringsewu, 4) Kab. Way

No	Provinsi	Jml APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	(+) / (-)	
						Kanan, 5) Kota Metro, 6) Kab Mesuji,
	Jumlah	154	37	37	-	
	Jawa					
1	Banten	8	4	4	-	1) Kab. Serang, 2) Kota Cilegon, 3) Kota Tangerang, 4) Kab. Pandeglang
2	DKI Jakarta					
3	Jabar	27	9	9	-	1) Kab. Garut, 2) Kab. Sumedang, 3) Kota Tasikmalaya, 4) Kota Depok, 5) Kab Bogor, 6) Kota Bekasi, 7) Kab. Kuningan, 8) Kab. Indramayu, 9) Kota Bogor
4	Jateng	35	15	15	-	1) Kab. Wonogiri, 2) Kab. Pekalongan, 3) Kab. Pati, 4) Kab. Kudus, 5) Kota Surakarta, 6) Kab. Karanganyar, 7) Kab. Boyolali, 8) Kab. Cilacap, 9) Kab. Grobogan, 10) Kab. Temanggung, 11) Kota Magelang, 12) Kab. Jepara, 13) Kab. Banyumas, 14) Kab. Blora , 15) Kab. Purworejo
5	DIY	5	3	3	-	1) Kab. Bantul, 2) Kab Gunung Kidul, 3) Kab. Sleman
6	Jatim	38	2	2	-	1) Kab. Banyuwangi, 2) Kab. Bondowoso
	Jumlah	113	33	33	-	
	Kalimanta n					
1	Kalbar	14	5	5	-	1) Kab. Kubu Raya, 2) Kab. Sintang, 3) Kota Pontianak, 4) Kota Singkawang, 5) Kab. Landak
2	Kalteng	14	1	1	-	1) Kab. Kotawaringin Timur
3	Kalsel	13	6	6	-	1) Kab. Banjar, 2) Kota Banjarmasin, 3) Kab. Tanah Bumbu, 4) Kab. Tanah Laut, 5) Kab. Barito Kuala, 6) Kab. Hulu Sungai Utara
4	Kaltim	10	4	4	-	1) Kota Samarinda, 2) Kab. Penajam Paser Utara, 3) Kota Balikpapan, 4) Kab. Bontang
5	Kaltara	5	-	-	-	-
	Jumlah	56	16	16	-	
	Sulawesi					
1	Sulut	15	2	2	-	1) Kota Tomohon, 2) Kab. Kep. Talaud
2	Gorontalo	6	4	4	-	1) Kab. Gorontalo, 2) Kab. Pohuwato, 3) Kab. Boalemo, 4) Kota Gorontalo
3	Sulbar	6	2	2	-	1) Kab. Majene, 2) Kab. Polewali Mandar
4	Sulteng	13	-	-	-	-

No	Provinsi	Jml APIP Kab/Kot	APIP Kab/Kot Kapabilitas Minimal Lv 3			APIP Kab/ Kota dengan Kapabilitas Minimal Lv 3
			Tw I 2018	Tw II 2018	(+) / (-)	
5	Sulsel	24	4	4	-	1) Kab. Pinrang, 2) Kab. Bantaeng, 3) Kota Makassar, 4) Kab. Bulukumba
6	Sultra	17	-	-	-	-
	Jumlah	81	12	12	-	
	Bali + Nusa Tenggara					
1	Bali	9	4	4	-	1) Kab. Gianyar, 2) Kab. Badung, 3) Kab Jembrana, 4) Kab Tabanan
2	NTB	10	4	4	-	1) Kota Mataram, 2) Kab. Sumbawa Barat, 3) Kab. Lombok Barat, 4) Kab. Lombok Tengah
3	NTT	22	7	7	-	1) Kab. Manggarai Timur, 2) Kab. Nagekeo, 3) Kab. Sikka, 4) Kab. Sumba Timur, 5) Kab. Flores Timur, 6) Kab. Ngada, 7) Kab. Manggarai Barat
	Jumlah	41	15	15	-	
	Maluku + Maluku					
1	Maluku	11	3	3	-	1) Kab. Maluku Tenggara, 2) Kab. Maluku Tengah, 3) Kota Ambon
2	Maluku Utara	10	2	2	-	1) Kota Tidore Kepulauan, 2) Kota Ternate
	Jumlah	21	5	5	-	
	Papua + Pabar					
1	Papua	29	1	1	-	1) Kab. Paniai
2	Papua Barat	13	3	3	-	1) Kab. Sorong, 2) Kab Teluk Bintuni, 3) Kab. Fakfak
	Jumlah	42	4	4	-	
	Total	508	122	122	-	

Sumber: Kedepatian PKD

Tabel 19. Kondisi Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota Tw II 2018

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
1	Aceh	23	8	11	4
2	Sumut	33	16	15	2
3	Sumbar	19	-	10	9
4	Riau	12	1	8	3
5	Kepri	7	1	4	2
6	Jambi	11	4	5	2

No	Provinsi	Jml Kab/Kota	Lv 1	Lv 2	≥ Lv 3
7	Sumsel	17	6	5	6
8	Bengkulu	10	5	4	1
9	Babel	7	-	5	2
10	Lampung	15	-	9	6
11	Banten	8	-	4	4
12	DKI Jakarta				
13	Jabar	27	2	16	9
14	Jateng	35	-	20	15
15	DIY	5	-	2	3
16	Jatim	38	8	28	2
17	Kalbar	14	-	9	5
18	Kalteng	14	-	13	1
19	Kalsel	13	-	7	6
20	Kaltim	10	3	3	4
21	Kaltara	5	2	3	-
22	Sulut	15	8	5	2
23	Gorontalo	6	-	2	4
24	Sulbar	6	-	4	2
25	Sulteng	13	4	9	-
26	Sulsel	24	11	9	4
27	Sultra	17	10	7	-
28	Bali	9	-	5	4
29	NTB	10	-	6	4
30	NTT	22	-	15	7
31	Maluku	11	3	5	3
32	Maluku Utara	10	1	7	2
33	Papua	29	21	7	1
34	Papua Barat	13	2	8	3
	Jumlah	508	116	270	122
	Persentase	100%	22,83%	53,15%	24,02%

Sumber: Kedeputian PKD

Upaya-upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2018 dalam upaya meningkatkan kapabilitas APIP K/L/Pemda antara lain sebagai berikut:

Tabel 20. Pembinaan Kapabilitas APIP K/L/Pemda Tw II 2018

No	Bimtek/ <i>Coaching Clinic</i> / QA Penilaian Kapabilitas APIP	Jml K/L/Pemda
1	Kementerian/ Lembaga	15
2	Pemerintah Provinsi	30
3	Pemerintah Kabupaten	300
4	Pemerintah Kota	70
	JUMLAH	415

Sumber: SIMA

B. Permasalahan dan Rencana Tindak

Permasalahan

Beberapa permasalahan dalam pengukuran dan pencapaian kinerja antara lain:

1. Indeks AP3N belum dapat diukur karena pelaksanaan penugasan pengukuran indeks AP3N direncanakan baru mulai pada triwulan IV.
2. Sampai dengan triwulan II tahun 2018, penugasan-penugasan yang dilaksanakan oleh Kedeputian masih dalam tahap pembinaan dalam rangka peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, sedangkan penugasan-penugasan QA atas

self assessment maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk mengetahui tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP K/L masih relatif sedikit.

Rencana Tindak

Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain yaitu:

1. Di tingkat K/L akan dilakukan koordinasi dalam rangka inisiasi telaah sejawat antara beberapa kementerian dan lembaga yang sudah siap melakukan telaah sejawat.
2. Meningkatkan komunikasi dalam rangka mewujudkan komitmen SPIP dan APIP melalui bincang pagi dengan K/L/Pemda.
3. Meningkatkan kapabilitas SDM APIP melalui workshop, bimtek, pemagangan, *on the job training*, pelatihan substantif tentang audit kinerja, manajemen risiko, dan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
4. Meningkatkan pemahaman SDM APIP atas program penjaminan kualitas pengawasan intern, baik internal maupun eksternal.

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Anggaran BPKP tahun 2018 sebesar Rp1.522.532.940.000. Sampai dengan Triwulan II tahun 2018 telah terealisasi anggaran sebesar Rp694.790.270.117,00 atau terserap 45,63%, dengan ringkasan sebagaimana tabel 21.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Keuangan BPKP Triwulan II Tahun 2018

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw I 2018 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	1.133.442.236.000	558.920.900.361	49,31
Program 06 (Pengawasan Intern)	389.090.704.000	135.869.369.756	34,92
Jumlah	1.522.532.940.000	694.790.270.117	45,63

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,


Slamet Hariadi
NIP 19590411 198101 1 001

**CAPAIAN KINERJA BPKP
TRIWULAN II TAHUN 2018**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi Tw II 2018	Persen	
			Tahun 2018	Tw. II 2018		Tahun 2018	Tw. II 2018
<i>Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional</i>							
1	Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita	Skala 1-5	Skala 2	Belum ditargetkan	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur
<i>Sasaran Strategis 2. Meningkatnya maturitas SPIP</i>							
2	Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Level 3	%	55%	20%	26.74%	48.62%	133.70
3	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	60%	36%	50.00%	83.33%	138.89
4	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	45%	22%	31.50%	70.00%	143.18
5	Persentase Korporasi dengan Efektivitas SPI Level 3	%	50%	Belum ditargetkan	Belum diukur	Belum diukur	Belum diukur
<i>Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda</i>							
6	Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas Level 3	%	56%	13%	27.91%	49.84%	214.69
7	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	74%	36%	50.00%	67.57%	138.89
8	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	51%	25%	24.02%	47.10%	96.08

**CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA PENGAWASAN ESELON I DI LINGKUNGAN BPKF
TRIWULAN II TAHUN 2018**

No.	Indikator Kinerja Utama	D1		D2		D3		D4		D5	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase program prioritas dengan indeks AP3N minimal level 2	30.77	0	100	0	55	0	-	-	-	-
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola program strategis nasional	-	-	-	-	-	-	60	62.08	-	-
3	Persentase Penghematan Biaya (cost saving)	-	-	-	-	-	-	4	5.72	-	-
4	Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG minimal baik	-	-	-	-	-	-	70	78.95	-	-
5	Persentase BUMN dengan kinerja minimal A (baik)	-	-	-	-	-	-	58	0	-	-
6	Persentase BUMD dengan kinerja minimal baik	-	-	-	-	-	-	55	59.63	-	-
7	Persentase BLUD dengan kinerja minimal baik	-	-	-	-	-	-	55	0	-	-
8	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	-	-	-	-	-	-	-	-	50	24.72
9	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	-	-	-	-	-	-	-	-	72	54.84
10	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-	-	-	-	-	-	-	65	23.08
11	Hasil pengawasan penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-	-	-	-	-	-	-	75	36.36
12	Hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	-	-	-	-	-	-	-	-	75	50
13	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan (HKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	75	33.33
14	Persentase K/L/P/K yang menerapkan FCP/FRA	-	-	-	-	-	-	-	-	52	62.5
15	Persentase auditor yang kompeten di bidang pencegahan	-	-	-	-	-	-	-	-	62	66.17
16	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	65	0
17	Persentase auditor yang kompeten di bidang keinvestigasian	-	-	-	-	-	-	-	-	62	33.09
18	Persentase K/L dengan maturitas SPIP level 3	64.29	29.63	56	24.07	50	50	67	33	-	-

No.	Indikator Kinerja Utama	D1		D2		D3		D4		D5	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
19	Persentase K/L dengan maturitas SPIP level 2	25	55.56	44	58.14	50	50	-	-	-	-
20	Persentase Pemprov dengan maturitas SPIP level 3	-	-	-	-	60	50	-	-	-	-
21	Persentase Pemprov dengan maturitas SPIP level 2	-	-	-	-	40	32.35	-	-	-	-
22	Persentase Pemkab/Pemkot dengan maturitas SPIP level 3	-	-	-	-	45	31.5	-	-	-	-
23	Persentase Pemkab/Pemkot dengan maturitas SPIP level 2	-	-	-	-	55	35.04	-	-	-	-
24	Persentase korporasi dengan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) level 3	-	-	-	-	-	-	50	0	-	-
25	Persentase APIP K/L dengan kapabilitas level 3	57.14	29.63	56	27.27	-	-	67	33	-	-
26	Persentase APIP K/L dengan kapabilitas level 2	32.14	51.85	44	43.64	100	100	33	33	-	-
27	Persentase APIP Pemprov dengan kapabilitas level 3	-	-	-	-	74	50	-	-	-	-
28	Persentase APIP Pemprov dengan kapabilitas level 2	-	-	-	-	26	47.06	-	-	-	-
29	Persentase APIP Pemkab/Pemkot dengan kapabilitas level 3	-	-	-	-	51	24.02	-	-	-	-
30	Persentase APIP Pemkab/Pemkot dengan kapabilitas level 2	-	-	-	-	28	53.15	-	-	-	-
31	Persentase korporasi dengan kapabilitas Satuan Pengawas Intern (SPI) level 3	-	-	-	-	-	-	50	0	-	-

Keterangan:

1. Target = Target tahunan (Tahun 2018)
2. Realisasi = Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2018

**CAPAIAN KINERJA UNIT KERJA PENGAWASAN ESELON II DI LINGKUNGAN BPKP
TRIWULAN II TAHUN 2018**

No.	Kode	Unit Kerja Pengawasan (Ditwas)	Jumlah IKU	Jml IKU dengan capaian kinerja thd target tahun 2018					
				> 100%	> 90% s.d 100%	> 60% s.d 90%	> 40% s.d 60%	≤ 40%	Belum Diukur
1	D101	Fiskal & Inves	5	2			2	1	
2	D102	Produksi & SDA	5		1		1	3	
3	D103	Industri & Distr	5	2				3	
4	D104	Pinjaman & BLN	-						
5	D105	Perekonomian Lainnya	4		2	1		1	
6	D201	Hankam	5	1		1		3	
7	D202	Lemsetina	4		1	1	1	1	
8	D203	Kesra	5	1	1	3			
9	D204	Polsoskam Lainnya	5	2				3	
10	D301	PKD Wil I	5						5
11	D302	PKD Wil II	7	1		1		5	
12	D303	PKD Wil III	1						1
13	D401	BU Agrobisnis, Konstruksi & Perdag	5	1				4	
14	D402	BU Perhubungan, Pariwisata	8		2		2	4	
15	D403	BU Keuangan & Manufaktur	5		1			4	
16	D404	BU Perminyakan & Gas Bumi	6	2		1		3	
17	D405	BUMD	5	1				4	
18	D501	Invest Instansi Pemerintah	7			1		6	
19	D502	Investigasi BUMN dan BUMD	5	1		1		3	
20	D503	Investigasi HKP	5			1		4	
21	PW01	Aceh	16	4		1	1	10	
22	PW02	Sumut	17	4	1	1		11	
23	PW03	Sumbar	16	1	2	3	1	9	
24	PW04	Riau	17	1	1	1	1	13	
25	PW05	Jambi	17	4	1			12	
26	PW06	Bengkulu	16	1	1	1		13	
27	PW07	Sumsel	16	1		2	2	11	
28	PW08	Lampung	14	2			3	9	
29	PW09	DKI Jakarta	15	1	1		1	12	
30	PW10	Jabar	19	1	2	1	1	14	
31	PW11	Jateng	16	5	2		2	7	
32	PW12	DIY	15	4	3	1	1	6	
33	PW13	Jatim	17	6	1	1	2	7	
34	PW14	Kalbar	16	1	2		2	11	
35	PW15	Kalteng	15	1	1	1	2	10	

No.	Kode	Unit Kerja Pengawasan (Ditwas)	Jumlah IKU	Jml IKU dengan capaian kinerja thd target tahun 2018					Belum Diukur
				> 100%	> 90% s.d 100%	> 60% s.d 90%	> 40% s.d 60%	≤ 40%	
36	PW16	Kalsel	14	1	2		3	8	
37	PW17	Kaltim	17	2	1	2	3	9	
38	PW18	Sulut	16	1	3	2	1	9	
39	PW19	Sulteng	17	1				16	
40	PW20	Sultra	16	2	1	2	1	10	
41	PW21	Sulsel	19	2	1	1	1	14	
42	PW22	Bali	17	1	2	1	1	12	
43	PW23	NTB	15	2	3		1	9	
44	PW24	NTT	13		2	2		9	
45	PW25	Maluku	16	2	1			13	
46	PW26	Papua	16	1	2		2	11	
47	PW27	Pabar	15	6	1		1	7	
48	PW28	Kepri	15		2			13	
49	PW29	Babel	14		1	2	2	9	
50	PW30	Banten	19	6	1	1	1	10	
51	PW31	Gorontalo	16		2	2		12	
52	PW32	Sulbar	15		4		1	10	
53	PW33	Malut	15		2		2	11	
54	PW34	Kaltara	14	3	1		2	8	
		JUMLAH	638	81	58	39	47	407	6
		PERSENTASE (%)	100	12.70	9.09	6.11	7.37	63.79	0.94

Keterangan:

Capaian Kinerja dihitung dari target tahunan (Tahun 2018)